



dakwahnya. Di antara media dakwah dalam hal ini dapat berupa barang (materi), orang, tempat, kondisi tertentu dan sebagainya.<sup>19</sup>

Menurut Moh. Ali Aziz ada tiga jenis media dakwah.<sup>20</sup>

- a. *Spoken Words*, yaitu media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang dapat ditangkap dengan indra telinga seperti radio, telepon, dan sebagainya.
- b. *Pinted writing*, yaitu media dakwah yang berbentuk tulisan, gambar, lukisan, dan sebagainya yang dapat ditangkap indra mata.
- c. *The audio visual*, yaitu media dakwah yang berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat seperti televisi.

Ada pula yang disebut media sosial, media sosial adalah bentuk komunikasi antar warga, yang ditandai dengan forum atau tatap muka, sifatnya personal dan aktif. Secara antropologis, dapat diambil contoh seperti forum di Jawa misalnya arisan, gotong royong, *selapanan*, dll. Media tradisional adalah adalah suatu institusi yang berfungsi mentransfer simbol nilai-nilai kepada masyarakat dan orang lain, apakah itu adatnya, hukumnya, atau nilai-nilai yang dianggap luhur oleh masyarakat. Media komunikasi tradisional biasanya bersifat tatap muka, tidak langsung, dan monolog intepretatif.<sup>21</sup>

Dari berbagai pengertian media diatas ketika itu digunakan untuk tujuan yang berbeda menghasilkan kosep yang berbeda pula. Media yang

---

<sup>19</sup> Hamzah Tualeka, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Indah Offset, 1993), hal. 58

<sup>20</sup> Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.149

<sup>21</sup> Jamil Gunawan, *Media dalam Perubahan Sosial Masyarakat Adat*, [http://www.ireyogya.org/adat/proceed\\_tot6.htm](http://www.ireyogya.org/adat/proceed_tot6.htm), Tanggal akses 12 Agustus 2009

merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Dalam segi pemberdayaan masyarakat. Media pemberdayaan merupakan suatu alat atau sarana dalam mencapai hasil yang maksimal dalam setiap proses pemberdayaan dilaksanakan. Dalam kegiatan pemberdayaan, media yang dipakai tidak hanya media komunikasi saja. Seperti halnya dalam pelaksanaan dakwah, tontonan wayang kulit bisa mejadi media dalam melaksankan dakwah.

## 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.<sup>22</sup> masyarakat yang lemah atau kurang beruntung disadarkan dan diberi rangsangan sehingga kehidupan masyarakat tersebut lebih berdaya.

Pemberdayaan adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.<sup>23</sup> ketika masyarakat mampu memilih apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya dan tidak terkenggang oleh keadaan sehingga mereka

---

<sup>22</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, h.82

<sup>23</sup> Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* h.41

mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berdaya.

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkat taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.<sup>24</sup> Dalam memberdayakan suatu masyarakat, konsep pemberdayaan yang dijalankan tentunya berbeda-beda, melihat keadaan suatu masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

---

<sup>24</sup> Moh. Ali Azis, dkk (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat; Paradigma Aksi Metodologi*, h. 170





bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :<sup>28</sup>

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan mengimbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga. Yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktifitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan

---

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 59

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi, dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “power” dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. *learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan kongkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat

---

<sup>29</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, h.86



masyarakat.<sup>30</sup> Masyarakat yang lemah atau yang tidak berdaya diberikan peluang untuk dapat mengembangkan diri menjadi masyarakat yang mandiri dan terlepas dari perangkap kemiskinan.

Tujuan pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah – langkah kecil guna terpacainya tujuan yang lebih besar.<sup>31</sup> Masyarakat diberdayakan agar tercipta suatu sistem keadilan sosial berpihak pada masyarakat lemah.

Dalam konsep yang lain, tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu di ketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidak berdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :<sup>32</sup>

- a. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.

---

<sup>30</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, h. 75

<sup>31</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, h. 86

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 60

- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan keluarga.

Dengan demikian tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat agar meningkatnya harkat dan martabat lapisan masyarakat yang lemah sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tentram dan berkeadilan sosial.

#### 4. Model-model Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Kita dapat mengenali bahwa ada tiga upaya utama dalam pemberdayaan, yaitu melakukan upaya pemberian kesempatan, pemihakan, dan perlindungan.<sup>33</sup>

##### a. Upaya Pemberian Kesempatan

Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme, dan tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan kelompok berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu. Dengan banyak memberikan kesempatan pada masyarakat lemah sehingga masyarakat dapat berkembang menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.

---

<sup>33</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, h. 205





- c. Kemampuan membeli komoditas besar yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu warga ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua yang mengambil uang, tanah perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa; seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau



mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Percepatan pada satu sektor pada sektor lainnya bisa berbeda, demikian pula antara satu wilayah dan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan amatlah penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin pada masyarakat.

Untuk mengetahui berapa jauh pemberdayaan masyarakat berhasil, perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran sejauh mungkin yang dapat diukur untuk dibandingkan.

Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat. Disini, peran ekonomi memang sangat penting. Cara pengukurannya pun banyak berkembang, seperti indeks GINI, jumlah orang yng hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan usaha berskala mikro dan kecil, nilai tukar petani, upah minimum dan sebagainya.

Pembangunan manusia berkualitas bukan hanya menyangkut aspek perekonomian, tetapi juga disisi lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dibidang ini, ukurannya juga telah banyak dikembangkan, anantara lain persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian

bayi per 1.000 kelahiran hidup, presentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup.

Manusia juga harus mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi melalui pembangunan spiritual, sebagai bagianh pemberdayaan masyarakat, dalam rangka membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu adalah pembangunan budaya, yakni untuk menciptakan, diatas budaya menjadi jati diri bangsa Indonesia, sikap kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi, dan siap bersaing.

Pemberdayaan masyarakat harus pula membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya . masyarakat yan secara politik terisolasi bukanlah masyarakat yang berdaya, oleh karena itu, aspek politik juga ada dalam pemberdayaan masyarakat.

Jadi, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga pada level rumah tangga bahkan individu. Oleh karena itu, untuk mengukur pemberdayaan kita dapat melihat ukuran pemberdayaan dari segi ukuran kemiskinan.

## 7. Kompleks Pemberdayaan

Ada tiga kompleks pembedayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keummatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran rohaniah, intelektual dan ekonomi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* h.44

Pertama, pemberdayaan pada matra rohaniyah. Degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran islam. Perbedaan kaum muslim terutama mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooperasi oleh budaya negatif barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama di hampir semua lini pendidikan. Untuk keluar dari belitan persoalan ini, masyarakat islam harus berjuang keras untuk mengalihkan pesaing besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan, yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total rohaniyah islamnya, yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Dengan sangat telanjang dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia bahkan dimana pun sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar. Dalam konteks jurisprudensi tanggungjawab sosial Islam, masyarakat Islam harus berani mengedepankan jargon geologi sosial dibawah ini :<sup>37</sup>

1. Bahwa malas belajar adalah dosa besar sosial Islam
2. Bahwa pemberdayaan intelektual harus merupakan gerakan semua lini keummatan

---

<sup>37</sup> Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, h.45

3. Bahwa setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus diakselerasikan.
4. Bahwa pada tataran manajemen operasional, masyarakat Islam, terutama mereka yang berkecimpung dalam wilayah manajemen korporasi keummatan, harus siap menghadapi gelombang reengineering yang berorientasi pada sistem manajemen keunggulan, yang boleh jadi harus meninggalkan pola-pola manajemen dan kepemimpinan yang tidak efektif, efisien, dan produktif untuk diganti dengan pola-pola manajemen kepemimpinan profesional dan strategis. Penolakan terhadap gerakan ini harus dinilai sebagai hambatan-hambatan paling nyata terhadap gerakan pemberdayaan intelektual masyarakat Islam.
5. bahwa untuk menjalankan ideal–ideal diatas, diperlukan gerakan aksional penggalan dan penghimpunan kekuatan-kekuatan ekonomis, yang diupayakan oleh setiap komponen umat bersama-sama masyarakat Islam, dengan manajemen yang transparan dan profesional.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab bersama. Situasi ekonomi



*“..Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..” (QS Ar-Ra’d 13: 11)*

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumberdaya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat.

Ketidakterdayaan merupakan suatu keadaan dari masyarakat yang hidup serba kekurangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh manusia.

Menurut Randy R. Wrihatnolo, pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instant”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>39</sup>

#### 1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan

---

<sup>39</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, h. 2





